



RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

KECAMATAN SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA

Alamat : Jalan Raya Pemda No. Desa Singasari Kecamatan Singaparna
e-mail : kec.singaparna123@gmail.com / Kode Pos. 46412

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT. atas limpahan Rahmat Taufik dan Hidayah Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025. Rencana Kerja Perangkat Daerah ini suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Singaparna Tahun 2025.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Singaparna Tahun 2025 ini adalah dalam rangka Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Singaparna. Apabila dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini terdapat kekurangan, kami sangat terbuka untuk menerima saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ini.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Singaparna ini bisa menjadi tolak ukur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Sekian, semoga Alloh SWT. Senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah Nya.

Singaparna, Januari 2024

CAMAT SINGAPARNA



H. YANA SURYANA, S.IP., MSi.

NIP. 19690814 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1	
1.2. Landasan Hukum.....	2	
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4	
1.4. Sistematika Penulisan	4	
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan Capaian Renstra	6	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	19	
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	21	
2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD	23	
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	30	
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	34	
3.2. Tujuandan Sasaran Rencana Kerja	35	
3.3. Program dan Kegiatan	36	
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD	
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan OPD	41	
BAB V	PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Singaparna adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026, pada tahun 2025 memasuki tahun Kelima dalam implementasinya, sehingga RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, RKPD Tahun 2025 menjadi rencana tahun Keempat RPJMD 2021-2026. Proses penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra OPD 2021-2026, dan RKPD Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025.

Proses penyusunan Rencana Kerja terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang definitif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya.

Renja perangkat daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu untuk menjembatani perencanaan tingkat perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan strategis

jangka menengah (RPJMD dan Renstra) untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Renja disusun oleh masing-masing perangkat daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja perangkat daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah yang akan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten serta sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi maupun APBN.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Singaparna Tahun 2025 merupakan bagian dari RKPD Kabupaten Tasikmalaya dan berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dari seluruh program kegiatan tahunan OPD Kecamatan Singaparna. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) disusun untuk memberikan informasi data bagi rencana kerja tahunan sehingga memudahkan bagi OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan evaluasi kinerja OPD. Renja diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro rencana pelaksanaan program kegiatan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tahun mendatang akan makin mendekat pada ke tataran *clean government* dan *good governance*.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Peraturan dan Perundang-undangan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Singaparna adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

- Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2023 (27 Oktober 2023) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023;
 12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan;
 14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 84 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmaaya Tahun 2023;
 15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 44 tahun 2023 (27 Oktober 2023) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan

mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam OPD Kecamatan Singaparna serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Singaparna Tahun 2025 adalah memberikan informasi deskripsi kondisi riil Kecamatan Singaparna beserta potensi yang dimiliki dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan di Kecamatan Singaparna, sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Singaparna Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian renstra, Analisa Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Restra.

BABIII TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja, serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan OPD Tahun 2025.

BABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang Rencana Kerja serta Pendanaan Kegiatan OPD

BABVPENUTUP

Berisi Kesimpulan Umum Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Singaparna Tahun 2021-2026, visi Kecamatan Singaparna adalah ***“Kecamatan Singaparna yang religius / islami kompetitif bidang jasa dan perdagangan sebagai Kecamatan termaju dalam pelayanan prima di Kabupaten Tasikmalaya”***. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Kecamatan Singaparna yaitu;

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa serta profesional dibidang pelayanan.
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan jasa dan perdagangan.
3. Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dengan memperhatikan tata lingkungan yang hijau sebagai pusat Pemerintahan.
4. Mewujudkan metode kerja yang cepat dan tepat.

Dalam rangka mencapai visidanmisi sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Singaparna pada tahun 2025 melaksanakan 2 Urusan yaitu ;

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna
2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Singaparna

Kedua urusan OPD Kecamatan Singaparna dijabarkan dalam 5 Program dan diimplementasikan dalam 10 Kegiatan. Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Singaparna TA. 2025 diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Kecamatan Singaparna
Tahun Anggaran 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.807.491.612,-	1.707.488.323,-	94,46 %
	Administrasi Umum Perangkat	Penyediaan Peralatan dan	49.150.000,-	49.150.000,-	100 %

	Daerah	Perlengkapan Kantor			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000,-	7.000.000,-	100 %
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.200.000,-	5.200.000	100 %
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	22.550.000,-	22.550.000	100 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.500.000,-	14.500.000,-	100 %
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.400.000,-	29.400.000,-	100 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.650.000,-	72.391.800	100 %
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.200.000,-	10.200.000,-	100 %
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Keg.Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	190.650.000,-	190.650.000,-	100 %
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000,-	15.000.000,-	100 %
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	21.450.000,-	21.450.000,-	100 %
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	203.625.000,-	201.774.800,-	99,07 %
PROGRAM PENYELENGGARA	Penyelenggaraan Urusan	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	25.000.000,-	25.000.000,-	100 %

AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	13.950.000,-	13.950.000,-	100 %
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	16.175.000,-	16.175.000	100 %
JUMLAH			2.506.991.612,-	2.394.594.742,-	95,51%

Pengukuran kinerja Kecamatan Singaparna didasarkan pada sasaran strategis dan capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel2.1.2
Pengukuran Kinerja Utama Kecamatan Singaparna Tahun 2024

PROGRAM / KEGIATAN	KEGIATAN				
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET) RP.	REALISASI
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input	Jumlah Dana Waktu pelaksanaan Kegiatan	Rp TA 2024	
		Output	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	12
		Outcome	Gaji dan Tunjangan ASN	%	100
		Benefits	Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Kedinasan	%	100
		Impact	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan	%	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Input	Jumlah Dana Waktu pelaksanaan Kegiatan	Rp. TA	Tersedia na Dana

	Kantor					
		Output	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	
		Outcome	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan	12	
		Benefits	Kenyamanan pegawai dalam bekerja/memberikan pelayanan kepada masyarakat	%	100	
		Inpact	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Input	Jumlah Dana Waktu pelaksanaan Kegiatan	Rp. TA		
		Output	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	
		Outcome	Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	%	100	
		Benefits	Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Kedinasan	%	100	
		Inpact	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Input	Jumlah Dana Waktu pelaksanaan Kegiatan	Rp. TA		
		Output	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	
		Outcome	Fasilitasi Kunjungan Tamu	%	100	
		Benefits	Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kedinasan	%	100	
		Inpact	Meningkatnya Kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	%	100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input	Jumlah Dana Waktu pelaksanaan Kegiatan	Rp. TA		
		Output	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	
		Outcome	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	%	100	
		Benefits	Menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kedinasan	%	100	
		Inpact	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	%	100	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input	Jumlah Dana Waktu pelaksanaan Kegiatan	Rp. TA		
		Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	
		Outcome	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan	%	100	
		Benefits	Menunjang	%	100	

			Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan kedinasan			
		Inpact	Meningkatnya kualitas pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan	%	100	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input	Jumlah Dana Waktu pelaksanaan Kegiatan	Rp Bulan		
		Output	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	
		Outcome	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	%	100	
		Benefits	Terjaganya Pengamanan lingkungan gedung kantor	%	100	
		Inpact	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Input	Jumlah Dana Waktu Pelaksanaan kegiatan	Rp. TA		
		Output	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	9	
		Outcome	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	%	100	
		Benefits	Terpenuhnya kebutuhan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional kantor	%	100	
		Inpact	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Input	Jumlah Dana Waktu pelaksanaan Kegiatan	Rp. TA		
		Output	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	
		Outcome	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara	%	100	
		Benefits	Menunjang Kelancaran Pelaksanaan tugas dan Penyelenggaraan pemerintahan	%	100	
		Inpact	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	%	100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Koordinasi Penyelenggaraan Keg. Pemerintahan di Tingkat	Koordinasi/ Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan	Input	Jumlah Dana Waktu pelaksanaan Kegiatan	Rp. TA		

Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					
		Output	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	
		Outcome	Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Bulan	12	
		Benefits	Pelaksanaan pembangunan di Desa akan terkoordinasi dengan baik antara Pemerintah Kecamatan , Dinas terkait dan Pemerintah Desa	%	100	
		Inpact	Pelaksanaan pembangunan di Desa akan lebih terkontrol baik keberhasilan maupun kekurangannya	%	100	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Input	JumlahDana Waktupelaksanaan Kegiatan	Rp. TA		
		Output	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	
		Outcome	Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Bulan	12	
		Benefits	Pelaksanaan movev pelayanan publik di Desa akan terkoordinasi dengan baik antara Pemerintah Kecamatan , Dinas terkait dan Pemerintah Desa	%	100	
		Inpact	Pelaksanaan movev pelayanan publik di Desa akan lebih terkontrol baik keberhasilan maupun kekurangannya	%	100	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Input	JumlahDana Waktupelaksanaan Kegiatan	Rp. TA		
		Output	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	2	
		Outcome	Dokumen Non Perizinan Usaha yang	Bulan	12	

			Dilaksanakan			
		Benefits	Pelaksanaan Penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait pelayanan non usaha di Desa akan terkoordinasi dengan baik antara Pemerintah Kecamatan , Dinas terkait dan Pemerintah Desa	%	100	
		Inpact	Lebih tertibnya pelayanan non usaha yang ada di kecamatan	%	100	
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Input	Jumlah Dana Waktupelaksanaan Kegiatan	Rp. TA		
		Output	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	
		Outcome	Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	%	100	
		Benefits	Meningkatnya kualitas koordinasi dan fasilitas kegiatan pemerintahan tingkat Kecamatan	%	100	
		Inpact	Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintah	%	100	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Input	Jumlah Dana Waktupelaksanaan Kegiatan	Rp. TA		
		Output	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	20	

		Outcome	Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	%	100	
		Benefits	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan se Wilayah Kecamatan	%	100	
		Inpact	Meningkatnyakesadaran wawasan kebangsaan di Wilayah Kecamatan Singaparna	%	100	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Input	JumlahDana Waktupelaksanaan Kegiatan	Rp. TA		
		Output	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	12	
		Outcome	Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Bulan	12	
		Benefits	Terlaksananya Pembinaan Desa se Wilayah Kecamatan	%	100	
		Inpact	Lebih tertibnya administrasi keuangan Desa dan Pendayagunaan aset Desa	%	100	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Input	JumlahDana Waktupelaksanaan Kegiatan	Rp. TA Bulan		
		Output	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	
		Outcome	Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	%	100	
		Benefits	Terlaksananya perencanaanpembangunansesu aikebutuhanmasayarakat	%	100	
		Inpact	Meningkatnyakualitashasilpembangunanyangdapatdigunakanoleh Masyarakat	%	100	

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra OPD Kecamatan Singaparna sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat dalam Tabel 2.1.4

Tabel 2.1.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2024

Nama OPD : KECAMATAN SINGAPARNA

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2021-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA OPD TAHUN 2025)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD s/d TAHUN 2025	
					TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Singaparna	9,890,132,209	1,503,678,989	2.021.141.612	1.910.819.942	94,54	1,850,308,855	4,415,747,102	44.65
7.01.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	9,014,812,209	1,364,140,876	1.807.491.612	1.707.488.323	94,46	1,650,881,255	3,970,984,060	44.05
7.01.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9,014,812,209	1,364,140,876	1.807.491.612	1.707.488.323	94,46	1,650,881,255	3,970,984,060	44.05
7.01.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	258,018,000	43,003,000	83.900.000	83.900.000	100	69,677,600	147,399,850	57.13
7.01.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	122,430,000	20,405,000	49.150.000	49.150.000	100	53,170,600	91,549,850	74.78
7.01.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	26,988,000	4,498,000	7.000.000	7.000.000	100	8,757,000	17,330,000	64.21
7.01.001.2.06.008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	64,500,000	10,750,000	5.200.000	5.200.000	100	5,200,000	19,915,000	30.88

7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44,100,000	7,350,000	22.550.000	19.580.000	86,82	2,550,000	18,605,000	42.19
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik Daerah						22,482,400	22,482,400	100%
7	01	001	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Barang milik Daerah						22,482,400	22,482,400	100%
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172,800,000	26,277,813	43.900.000	41.209.819	93,87	43,900,000	95,075,642	55.02
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	100,800,000	14,277,813	14,500,000	11.809.819	93,87	14,500,000	36,875,642	36.58
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	72,000,000	12,000,000	29,400,000	29.400.000	100	29,400,000	58,200,000	80.83
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	444,502,000	70,257,300	75.650.000	72.391.800	95,69	85,850,000	202,287,550	45.51
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	364,120,000	56,860,300	75.650.000	72.391.800	95,69	75,650,000	173,433,750	47.63
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	80,382,000	13,397,000	10,200,000	10.200.000	51.54	10,200,000	28,853,800	35.90
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna	544,200,000	90,700,000	227.100.000	227.100.000	100	51,100,000	169,079,700	31.07
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	210,000,000	35,000,000	190.650.000	190.650.000	100	14,650,000	58,861,600	28.03

7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	150,000,000	25,000,000	190.650.000	190.650.000	100	14,650,000	46,672,650	31.12
7	01	002	2.01	002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	60,000,000	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	16.67
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	90,000,000	15,000,000	15,000,000	15.000.000	46.82	15,000,000	37,022,650	41.14
7	01	002	2.02	002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	90,000,000	15,000,000	15,000,000	15.000.000	46.82	15,000,000	37,022,650	41.14
7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat	244,200,000	40,700,000	21,450,000	21.450.000	51.49	21,450,000	73,195,450	29.97
7	01	002	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	244,200,000	40,700,000	21.450.000	21.450.000	51.49	21,450,000	73,195,450	29.97
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	452,200,000	74,897,400	203.625.000	201.749.800	99.07	178,625,000	312,801,700	69.17
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	452,200,000	74,897,400	203.625.000	201.749.800	99,07	178,625,000	312,801,700	69.17
7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	452,200,000	74,897,400	203.625.000	201.749.800	99,07	178,625,000	312,801,700	69.17

7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	150,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100 -	25,000,000	50,000,000	33.33
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	150,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100	25,000,000	62,548,500	41.70
7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100	25,000,000	62,548,500	41.70
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	120,000,000	20,000,000	30,125,000	30.125.000	100	17,075,000	60,649,300	50.54
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	120,000,000	20,000,000			-	17,075,000	37,075,000	30.90
7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	60,000,000	10,000,000	13,950,000	13.950.000	100	-	-	-
7	01	006	2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	60,000,000	10,000,000	16,175,000	16,175,000	100.00	17,075,000	43,250,000	72.08

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

OPD Kecamatan Singaparna merupakan OPD yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Artinya bahwa tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah peningkatan pelayanan Kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Singaparna, baik yang terkait dengan pelayanan Administrasi Surat Menyurat, fasilitasi kegiatan sosialekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Singaparna menyelenggarakan urusan yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna, dengan capaian indikator sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Singaparna

Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan Kecamatan Singaparna yaitu Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Singaparna, dengan capaian indikator sebagai berikut :

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Singaparna

Pada tahun 2023, Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya mencapai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Singaparna yaitu Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan Singaparna dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut ini :

Tabel2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

NO.	INDIKATOR	SPM / STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA OPD						REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI		CAPAIAN ANALISI
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna			79.90	80.50	80.85	81.20	81.55	81.95	79.90	77.83	80.85	81.20	81.55	81.95	
2.	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Singaparna			N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)	N/A	N/A	45.55	62.92	63	65	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam rangka mewujudkan tujuannya, OPD Kecamatan Singaparna telah melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD Kecamatan Singaparna. Beberapa program kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Sebagai OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan, ruang lingkup tugas Kecamatan Singaparna mencakup penunjang urusan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Ruang lingkup tugas ini turut mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Salah satu fokus pembangunan Kabupaten Tasikmalaya adalah Misi ke 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih, dan Profesional.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Singaparna dalam kaitan dengan pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :

❖ **Aspek kajian kelembagaan Kecamatan**

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain mengamanatkan bahwa dari sisi *budgeting* alokasi anggaran Kecamatan berasal dari APBD Kabupaten/Kabupaten yang dimasukkan dalam anggaran kecamatan. Dalam upaya untuk mengamankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terkait dengan kedudukan Kecamatan Singaparna, maka dibutuhkan komitmen dan dukungan kebijakan dana anggaran dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya kepada Kecamatan Singaparna, sehingga pembangunan di wilayah Kecamatan Singaparna tetap berjalan dengan pesat dan tidak ketinggalan dengan Kecamatan yang lainnya.

❖ **Aspek kajian dari sumber daya manusia**

Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi OPD Kecamatan Singaparna bisaterwujud. Kemudian faktor yang mempengaruhi secara intern antara lain yaitu motivasi kerja dan kapasitas SDM pegawai

Kecamatan Singaparna. Dalam upaya untuk memperkuat kapasitas dan menjaga motivasi kerja maka diperlukan adanya pelatihan dan bimbingan teknis secara berkelanjutan. Sementara dari sisi ekstern meliputi tuntutan untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern atau pengawasan melekat belum berjalan secara optimal.

❖ **Aspek kajian dari sarana dan prasarana**

Kondisi sarana dan prasarana penunjang yang terbatas namun tetap dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat, sehingga dengan kondisitersebut aparatur Kecamatan Singaparna harus dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan masyarakat. Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana ini antara lain mencakup kondisi peralatan dan perlengkapan kantoryang sudah tidak memadai yang perlu untuk pengadaan baru sehingga mencapai standar kelayakan untuk pelayanan, serta ketersediaan alat perkantoran yang memadai untuk menunjang kinerja dalam pelayanan masyarakat,

❖ **Aspek kajian dari jumlah anggaran**

Kondisi sosiologis masyarakat Kecamatan Singaparna yang bernuansa Kabupaten dengan berbagai kompleksitas dan dinamika yang ada tentu membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan yang berjalan selama ini tentu belum mampu menyentuh semua kebutuhan masyarakat. Dengan kondisi ini maka diharapkan adanya dukungan kebijakan anggaran yang memadai untuk menampung kebutuhan masyarakat. Untuk program dan kegiatan pembangunan yang belum tertampung dalam struktur anggaran Kecamatan, diharapkan dapat tercover untuk diimplementasikan di wilayah Kecamatan Singaparna.

Dari beberapa aspek kajian permasalahan yang dihadapi Kecamatan Singaparna sebagaimana diuraikan diatas, terdapat beberapa tantangan yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi peluang. Beberapa tantangan dan peluang yang ada antara lain :

- Posisi Kecamatan Singaparna yang berada di wilayah Kabupaten yang merupakan pusat pemerintahan daerah dan pusat perdagangan dan jasa,

sehingga sebagai wajahdepan Kabupaten Tasikmalaya maka ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang memadai mutlak dibutuhkan untuk menopang aktifitas warga yang berkarakteristik Kabupaten,

- Kecamatan Singaparna sebagai pusat aktifitas perekonomian daerah yang menjadiparameter dinamika ekonomi Kabupaten Tasikmalaya. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maka diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian warga yang berbanding lurus dengan pengurangan angka kemiskinan,
- Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerahmaka telah dilakukan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah, termasuk kedudukan kelembagaan Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten. Berdasarkan SOTK baru maka kedudukan kelembagaan Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten diterapkan, maka diharapkan tidakterjadi ‘degradasi’ dalam kaitan kebijakan dan alokasi anggaran, dapat memberikan dukungan dan pendampingan terhadap kinerja Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat berjalan lebih optimal.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan OPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Singaparna untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinyabahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*.

Kecamatan Singaparna merupakan salah satu OPD yang berperan strategis dalam konstalasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Pembangunan Kabupaten

Tasikmalaya dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan di Pusat Kabupaten juga mengalami perubahan yang nyata. Akselerasi transformasi sosial ekonomi politik di Kecamatan Singaparna akan menjadi suatu hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan Kabupaten Tasikmalaya.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kecamatan Singaparna membutuhkan sinergitas antara semua OPD yang ada. Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakala menilik bahwa alokasi anggaran untuk Kecamatan Singaparna sangat minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya. Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk melihat Kecamatan Singaparna secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4.1. :

Tabel 2.4.1.
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tasikmalaya

Nama OPD : KECAMATAN SINGAPARNA

KODE	RANCANGAN AWAL RKPD					REVISI HASIL NALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Singaparna	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Singaparna	Poin 5	1.994.885.728	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Singaparna	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Singaparna	Poin 5	1.994.885.728	
7.01.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Singaparna	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	%	1.795.355.728	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Singaparna	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	%	1.795.355.728	
7.01.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Singaparna	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun 1	1.795.355.728	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Singaparna	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun 1	1.795.355.728	
7.01.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Singaparna	Cakupan pelayanan administrasi umum	Laporan 31	69.750.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Singaparna	Cakupan pelayanan administrasi umum	Laporan 31	69.750.000	
7.01.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Singaparna	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket 6	35.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Singaparna	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket 6	35.000.000	
7.01.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Singaparna	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket 1	7.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Singaparna	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket 1	7.000.000	
7.01.001.2.06.008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Singaparna	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan 12	5.200.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Singaparna	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan 12	5.200.000	
7.01.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Singaparna	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan 12	22.550.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Singaparna	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan 12	22.550.000	

7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Singaparna	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	%	-		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Singaparna	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	%	100	22,482,400	
7	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Singaparna	Jumlah peralatan dan mesin	Unit	-		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Singaparna	Jumlah peralatan dan mesin	Unit	3	22,482,400.00	
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Singaparna	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	43,900,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Singaparna	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	43,900,000	
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Singaparna	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Laporan	1	14,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Singaparna	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Laporan	1	14,500,000	
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Singaparna	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	29,400,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Singaparna	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	29,400,000	
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Singaparna	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	85,850,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Singaparna	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	85,850,000	
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Singaparna	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	9	75,650,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Singaparna	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	9	75,650,000	
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Singaparna	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	3	10,200,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Singaparna	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	3	10,200,000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Singaparna	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna	Poin	3	61,100,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Singaparna	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna	Poin	3	61,100,000	

7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	24.650.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	24.650.000	
7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Singaparna	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	24.650.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Singaparna	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	24.650.000	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dokumen	1	15,000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dokumen	1	15,000,000	
7	01	002	2.02	002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Singaparna	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	15,000,000	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Singaparna	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	15,000,000	
7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Singaparna	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat	Urusan	2	21,450,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Singaparna	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat	Urusan	2	21,450,000	
7	01	002	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Singaparna	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	2	21,450,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Singaparna	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	2	21,450,000	
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Singaparna	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	203.625.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Singaparna	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	203.625.000	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Singaparna	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	5	203.625.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Singaparna	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	5	203625.000	

7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Singaparna	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	203.625.000	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Singaparna	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	203.625.000	
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Singaparna	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	25.000,000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Singaparna	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	25.000,000	
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Singaparna	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	25.000,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Singaparna	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	25.000,000	
7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Singaparna	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	20	25.000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Singaparna	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	20	25.000,000	
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Singaparna	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	30.125,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Singaparna	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	31.025,000	
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Singaparna	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%	100	30.125,000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Singaparna	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%	100	31.025,000	
7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Singaparna	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	12	13.950,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Singaparna	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	12	13.950,000	
7	01	006	2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Singaparna	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	16.175,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Singaparna	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	16.175,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun OPD yang terkait lainnya.

Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kecamatan sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Singaparna didiskusikan dalam pembahasan Forum OPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Usulan Program dan Kegiatan OPD Kecamatan Singaparna Tahun 2023 dapat kita lihat pada Tabel 2.5.1. dibawah ini :

Tabel 2.5.1.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Tasikmalaya

Nama OPD : KECAMATAN SINGAPARNA

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		BESARAN (Rp.)	CATATAN
1				2	8	9	10		11	12
7	1	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Singaparna	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Singaparna	Poin	5	1.994.855.728	
7	01	001	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Singaparna	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	%		1.795.355.728	
7	01	001	2.02	001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Singaparna	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	1.795.355.728	
7	01	001	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Singaparna	Cakupan pelayanan administrasi umum	Laporan	31	69.750.000	
7	01	001	2.06	002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Singaparna	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	6	35.000.000	
7	01	001	2.06	005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Singaparna	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	1	7.000.000	
7	01	001	2.06	008 Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Singaparna	Jumlah laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	5.200.000	
7	01	001	2.06	009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Singaparna	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	22.550.000	

7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Singaparna	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	%		-	
7	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Singaparna	Jumlah peralatan dan mesin	Unit	3	-	
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Singaparna	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	43.900.000	
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Singaparna	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Laporan	1	14.500.000	
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Singaparna	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	1	29.400.000	
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Singaparna	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	85.850.000	
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Singaparna	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	9	75.650.000	
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Singaparna	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Unit	3	10.200.000	
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Singaparna	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna	Poin	3	61.100.000	
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	2	24.650.000	

7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Singaparna	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	24.650.000	
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Singaparna	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Dokumen	1	15.000.000	
7	01	002	2.02	002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Singaparna	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	15.000.000	
7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Singaparna	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat	Urusan	2	21.450.000	
7	01	002	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Singaparna	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen	2	21.450.000	
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Singaparna	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	100	203.625.000	
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Singaparna	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	5	203.625.000	
7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Singaparna	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	5	203.650.000	
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kecamatan Singaparna	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	25.000.000	

7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Singaparna	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	%	100	25.000.000	
7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Kecamatan Singaparna	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	20	25.000.000	
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Singaparna	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	31.025.000	
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Singaparna	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	%	100	31.025.000	
7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Singaparna	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	12	13.950.000	
7	01	006	2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Singaparna	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	1	16.175.000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat 2 pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Di Kabupaten Tasikmalaya jenjang perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Renja yang disusun berpedoman pada Renstra dan mengacu pada RKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Dengan begitu maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah juga dituntut untuk mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang partisipatif.

Dalam proses mendukung kondisi tersebut maka diperlukan kemampuan teknis perencanaan sehingga dapat mendorong berkembangnya perencanaan yang lebih baik dan memunculkan kegiatan-kegiatan yang membawa kearah yang lebih baik lagi dan dapat merubah pola perencanaan dari *shopping list* ke *working plan*.

Kecamatan Singaparna sebagai perangkat daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kabupaten. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi-instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Singaparna di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Singaparna yang meliputi sebagian prioritas pembangunan,

sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Singaparna telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Berdasarkan Tahapan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, salah satunya adalah tahapan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja, adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah paling lambat minggu pertama bulan Desember;
2. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan

Kecamatan Singaparna melaksanakan 2 (Dua) Urusan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Singaparna, sehingga program kegiatan di Kecamatan Singaparna mendukung :

1. Prioritas 1 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Singaparna
2. Prioritas 2 yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Singaparna

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Singaparna maka tujuan Rencana Kerja Kecamatan Singaparna Tahun 2025 sesuai dengan visi Pembangunan Kecamatan Singaparna adalah ***“Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik”***. Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada tujuan dalam rencana kerja Kecamatan Singaparna adalah ***“Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Singaparna, Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Singaparna ”***. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Singaparna 2023 beserta indikator sasaran dan target kinerja sasaran dijelaskan dengan target sebagai berikut :

Tabel 3.1.1.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Singaparna Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	Satuan	Baseline (2021)	REALISASI KINERJA PADA TAHUN KE-		TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-			KONDISI AKHIR RENSTRA
					2022	2023	2025	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Singaparna	Poin	NA	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)	65 (B)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Singaparna	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Singaparna	Poin	N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	65 (B)	65 (B)
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Singaparna	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna	Poin	79.90	80.50	80.85	81.20	81.55	81.95	81.95
	Meningkatnya kondusifitas wilayah Kecamatan Singaparna	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	%	92.62	93.50	93.50	93.85	94.25	94.25	94.25
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Kecamatan Singaparna Tahun 2023 mencakup 5 (Lima) Program dan 10 (Sepuluh) kegiatan yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA;
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK ;
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ;
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ;
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA ;
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rumusan rencana program dan kegiatan OPD Kecamatan Singaparna Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 secara detail dapat dilihat pada tabel 3.3.1 berikut :

Tabel 3.3.1.

Revisi Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Tasikmalaya

Nama OPD : KECAMATAN SINGAPARNA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Singaparna	Kecamatan Singaparna	90.98 %		APBD		91.50 %	1.994.855.728
7 01 001 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	Kecamatan Singaparna		1.807.491.612	APBD			1.795.355.728
7 01 001 2.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Singaparna		1.807.491.612	APBD			1.795.355.728
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	Kecamatan Singaparna		83.900.000	APBD			69.750.000
7 01 001 2.06 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kecamatan Singaparna		49.150.000	APBD			35.000.000
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kecamatan Singaparna		7.000.000	APBD			7.000.000
7 01 001 2.06 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Singaparna		5.200.000	APBD			5.200.000
7 01 001 2.06 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Singaparna		22.550.000	APBD			22.550.000

7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	Kecamatan Singaparna		-	APBD			-
7	01	001	2.07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin	Kecamatan Singaparna		-	APBD			-
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Singaparna		43.900.000	APBD			43.900.000
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	Kecamatan Singaparna		14.500.000	APBD			14.500.000
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kecamatan Singaparna		29.400.000	APBD			29.400.000
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Singaparna		85.850.000	APBD			85.850.000
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kecamatan Singaparna		75.650,000	APBD			75.650.000
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kecamatan Singaparna		10,200,000	APBD			10.200.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna	Kecamatan Singaparna	100 %	227.100.000	APBD		100 %	61.100.000
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Singaparna		190.650.000	APBD			24.650.000

7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Singaparna		190.650.000	APBD			24.650.000
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Singaparna		15.000,000	APBD			15.000.000
7	01	002	2.02	002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Singaparna		15.000,000	APBD			15.000.000
7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat	Kecamatan Singaparna		21.450.000	APBD			21.450.000
7	01	002	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Singaparna		21.450.000	APBD			21.450.000
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	Kecamatan Singaparna	99.86 %	203.625.000	APBD		99.86 %	203.625.000
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kecamatan Singaparna		203.625.000	APBD			203.625.000
7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Singaparna		203.650.000	APBD			203.650.000

7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Singaparna	100 %	25.000.000	APBD		100 %	25.000.000
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Singaparna		25.000.000	APBD			25.000.000
7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kecamatan Singaparna		25.000.000	APBD			25.000.000
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Singaparna	100 %	31.025.000	APBD		100 %	31.025.000
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	Kecamatan Singaparna		31.025.000	APBD			31.025.000
7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Singaparna		13.950.000	APBD			13.950.000
7	01	006	2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kecamatan Singaparna		16.175.000	APBD			16.175.000

BABIV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan OPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Singaparna tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun program dan Kegiatan dalam perencanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Singaparna Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA;
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK;
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM ;
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM ;
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA ;
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan OPD Kecamatan Singaparna disajikan pada Tabel 4.1 berikut ini :

Tabel 4.1.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD KABUPATEN TASIKMALAYA

Nama OPD : KECAMATAN SINGAPARNA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		UNIT KERJA OPD PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
				2024		2025		TARGET	Rp.		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
7 1 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Singaparna		90.98 %		90.98 %	1.994.855.728	90.98 %	3,764,969,775	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7 01 001 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan		90.43 %	1.807.491.612	90.43 %	1.795.355.728	90.43 %	3,345,149,775	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7 01 001 2.02 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	1 Tahun	83.900.000	1 Tahun	1.795.355.728	2 Tahun	3,345,149,775	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7 01 001 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum		100 %	49.150.000	100 %	69.750.000	100 %	137,837,600	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7 01 001 2.06 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100 %	6 Paket	7.000.000	6 Paket	35.000.000	12 Paket	85,670,600	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7 01 001 2.06 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100 %	1 Paket	5.200.000	1 Paket	7.000.000	2 Paket	15,757,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7 01 001 2.06 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 %	12 Laporan	22.550.000	12 Laporan	5.200.000	24 Laporan	11,200,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya

7	01	001	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 %	12 Laporan	-	12 Laporan	22.550.000	24 Laporan	25,210,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7	01	001	2.07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-					
7	01	001	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			43.900.000						
7	01	001	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	14.500.000	100 %	43.900.000	100 %	87,800,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7	01	001	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	100 %	1 Laporan	29.400.000	1 Laporan	14.500.000	2 Laporan	29,000,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7	01	001	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100 %	1 Laporan	85.850.000	1 Laporan	29.400.000	2 Laporan	58,800,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7	01	001	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	75,650,000	100 %	85.850.000	100 %	171,700,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7	01	001	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100 %	9 Unit	10,200,000	9 Unit	75.650.000	18 Unit	151,300,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7	01	001	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	100 %	3 Unit	227.100.000	3 Unit	10.200.000	6 Unit	20,400,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Singaparna		100 %	190.650.000	100 %	61.100.000	100 %	102,200,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7	01	002	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen	190.650.000	1 Dokumen	24.650.000	2 Dokumen	29,300,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya

7	01	002	2.01	001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100 %	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	24.650.000	2 Laporan	29,300,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7	01	002	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7	01	002	2.02	002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	100 %	1 Laporan	21.450.000	1 Laporan	15.000.000	2 Laporan	30,000,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat		2 Urusan	21.450.000	2 Urusan	21.450.000	4 Urusan	42,900,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7	01	002	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	100 %	2 Dokumen	203.625.000	2 Dokumen	21.450.000	4 Dokumen	42,900,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti		99.86 %	203.625.000	99.86 %	203.625.000	%	249,425,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum		5 Dokumen	203.650.000	5 Dokumen	203.625.000	10 Dokumen	249,425,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	100 %	5 Laporan	25.000.000	5 Laporan	203.650.000	10 Laporan	249,425,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya

7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	50,000,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	25.000.000	100 %	25.000.000	100 %	50,000,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 %	20 Orang	20 Orang	25.000.000	40 Orang	50,000,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang- undangan	100 %	31.025.000	100 %	31.025.000	100 %	61,150,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100 %	13.950.000	100 %	31.025.000	100 %	61,150,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	13.950.000	24 Dokumen	27,900,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya
7	01	006	2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	16.175.000	2 Dokumen	33,250,000	Kecamatan Singaparna	Tasikmalaya

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Singaparna Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Proses penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Hal ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Sesuai dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain :

- a. Bahwa pelaksanaan atau realisasi dari Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Singaparna pada tahun-tahun sebelumnya telah dapat direalisasikan secara baik dengan prinsip *servic eexcellent*, yaitu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Singaparna,
- b. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

Rencana tindak lanjut dari program dan kegiatan Kecamatan Singaparna adalah tetap mengedepankan prinsip pemerintahan yang baik (*good government*) dalam rangka menuju pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan berwibawa untuk peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Singaparna.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Singaparna ini disusun dalam konsep sederhana dengan harapan dapat memberikan pedoman dan gambaran nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dan kontribusi yang positif dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Singaparna Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai di OPD Kecamatan Singaparna serta partisipasi aktif seluruh *stake holder* terkait.

CAMAT SINGAPARNA



HAIANA SURYANA, S.IP., MSi.
NIP. 19690814 200212 1 005